

SEJARAH PEMIKIRAN DIPLOMATIK: KONFLIK INDONESIA-BELANDA PADA KMB DAN ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN

Epa Juliarni, Mestika Zed

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
epajuliarni79@gmail.com

Abstract

After the proclamation of Indonesian independence in 1945, Indonesia was not yet fully independent. The Dutch returned and wanted to dominate Indonesia. There was a conflict between Indonesia and Dutch caused them confront to the negotiating table. Through the Round Table Conference, Indonesia was recognized as an independent country both de facto and de jure. The full independence was obtained with several agreements whereas other was harmed. The agreement is about the problems of debt, the Union, and West Irian. These problems caused controversy at later time. The Union problem in 1956 which Indonesia unilaterally canceled the Indonesia-Dutch Union. Also, the West Irian problem between the Indonesia and Dutch conflict was difficult to resolve. Based on the results of researches, the emergence of the problem of West Irian was motivated by different views in assessing the status of West Irian. It refers to the conviction of each country to entitled West Irian into its territory. Finally, the problem of West Irian could be resolved through act of free choice (PEPERA), but it caused new complex problems. The problems were the Free Papua Organization (OPM), the Freeport case and Special Autonomy (Otsus).

Keywords: *Round Table Conference (KMB), Conflict, West Irian, Uni Dutch-Indonesia, Act of Free Choice (PEPERA)*

Abstrak

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Belanda kembali dan ingin menguasai Indonesia. Disini, terjadilah konflik antara Indonesia dan Belanda yang membawa kedua negara ke meja perundingan. Barulah pada Konferensi Meja Bundar, Indonesia diakui sebagai negara merdeka baik secara de facto maupun de jure. Kemerdekaan penuh diperoleh dengan beberapa kesepakatan yang merugikan salah satu pihak. Kesepakatan tersebut adalah mengenai masalah utang, masalah Uni dan masalah Irian Barat. Masalah-masalah tersebut dikemudian hari menyebabkan kontroversi. Seperti masalah Uni yang pada tahun 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Selain itu, juga masalah Irian Barat yang merupakan konflik Indonesia-Belanda yang sulit untuk diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, munculnya masalah Irian Barat dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan antara Indonesia dan Belanda

dalam menilai status Irian Barat. Kedua negara merasa paling berhak menyertakan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Masalah Irian Barat yang akhirnya dapat diselesaikan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) ternyata memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Adapun masalah tersebut adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), kasus Freeport dan Otonomi Khusus (Otsus).

Kata kunci: Konferensi Meja Bundar (KMB), Konflik, Irian Barat,
Uni Indonesia-Belanda, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas masalah perebutan Irian Barat (Papua) antara Indonesia dengan Belanda pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Seperti yang kita ketahui, Irian Barat menjadi pusat perhatian semenjak diadakannya KMB. Dalam KMB, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, tetapi tidak termasuk Irian Barat. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam suatu perundingan Uni Indonesia-Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Berdasarkan keputusan tersebut terlihat jelas bahwa Belanda sebenarnya tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.¹

Penundaan ini mengakibatkan Indonesia masih harus memikul beban sisa-sisa kolonialisme. Sengketa Irian Barat yang berlarut-larut menyedot energi bangsa Indonesia. Energi tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional, mengingat waktu itu Indonesia masih tergolong negara yang baru merdeka. Tetapi kenyataannya setiap kabinet di era Demokrasi Parlementer (1950-1957) malah menjadikan sengketa Irian Barat menjadi masalah prioritas. Indonesia melakukan berbagai upaya dalam merebut Irian Barat mulai dari diplomasi sampai dengan militer sehingga Indonesia mendapatkan dukungan internasional. Dimasa Demokrasi Terpimpin tahun 1963 berhasil menyepakati Perjanjian New York yang mengatur peralihan kekuasaan Belanda atas Irian Barat kepada Indonesia. Selanjutnya, di era Demokrasi Pancasila tahun 1969 dilakukan penentuan pendapat rakyat, hasilnya

¹ Nuura Nurida Fasa, "Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951", *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 138

menyatakan bahwa Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Dengan demikian, sengketa Irian Barat telah membebani tiga generasi politik Indonesia.²

Mengingat masalah Irian Barat yang berlarut-larut dan sulit menemukan titik temu atau kesepakatan, penulis tertarik untuk menganalisis alasan keengganan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Apakah karena alasan Irian Barat memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang yang luar biasa³ atau pendapat Siswanto yang menyatakan bahwa penangguhan tersebut merupakan strategi Belanda, dimana jika Indonesia kacau, Belanda bisa kembali ke Indonesia melalui Irian Barat⁴ atau juga apakah karena Indonesia lemah dalam perundingan. Dari sudut pandang penulis, perlu rasanya untuk memaparkan semua alasan tersebut dengan mencari berbagai sumber untuk menganalisis alasan dibalik keengganan Belanda menyerahkan Irian Barat, mengingat betapa lamanya penyelesaian masalah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana konflik Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar?
2. Apakah keputusan Belanda di Irian Barat (Papua) terkait kepentingan ekonomi masa depan Belanda di Hindia-Belanda?
3. Apa argumen Belanda mempertahankan dan Indonesia meminta Irian Barat?
4. Bagaimana pengaruh konflik Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda bagi Irian Barat dikemudian hari?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dan studi kepustakaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah.

² Siswanto Ahmed, ‘Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950: Sebuah Kajian Historis’, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 2, No. 1 (2005), hlm. 67

³ Nuura Nurida Fasa, ‘Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951’, *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 138

⁴ Siswanto Ahmed, ‘Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950: Sebuah Kajian Historis’, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 2, No. 1 (2005), hlm. 65-72

Heuristik: sumber primer diperoleh dari perpustakaan Universitas Negeri Padang berupa buku Memoir Hatta. Sumber sekunder diperoleh melalui buku-buku yang terdapat di Perpustakaan Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Jurusan serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat. Disamping itu beberapa sumber juga diperoleh dari situs internet berupa jurnal ilmiah, manuskrip dan surat kabar online.

Kritik sumber atau tahap pengujian terhadap sumber yang telah dikumpulkan. Setelah dilakukan klarifikasi sumber baik sumber primer maupun sekunder kemudian sumber tersebut dianalisis. Selanjutnya sumber-sumber yang ada dibandingkan satu sama lain agar lebih meyakinkan kebenarannya.

Interpretasi atau penafsiran, dengan mencari hubungan antar fakta yang telah ditemukan kemudian menghubungkannya sehingga membentuk rekonstruksi fakta sejarah. Akhir dari kegiatan ini adalah terjawabnya semua rumusan masalah.

Penulisan sejarah, penyajian hasil laporan penelitian dalam bentuk karya tulis sehingga sumber yang sebelumnya masih terpecah-pecah menjadi tersusun rapi dalam bentuk cerita sejarah yang menarik untuk dibaca. Setelah dilakukan langkah heuristik, kritik sumber dan interpretasi maka dilakukan penulisan akhir sebagai hasil penelitian sejarah yang berjudul, “Penyelidikan Sejarah Tentang Penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda pada KMB dan Isu Yang Belum terselesaikan”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Indonesia dan Belanda dalam KMB

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag. KMB dimulai dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB ini bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda guna mencapai kesepakatan antara peserta tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia

Serikat.⁵ Persengketaan yang dibahas dalam KMB adalah mengenai masalah utang, ikatan Uni dalam Uni Indonesia-Belanda dan masalah Irian Barat, yang nantinya jika terjadi kesepakatan akan tiga hal tersebut, Belanda akan mengakui kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.

1.1 Masalah utang

Sebelum KMB ditutup masalah utang masih sulit diselesaikan. Menurut Belanda, semua utang pemerintahannya harus diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat pada saat penyerahan kedaulatan. Belanda menginginkan hanya utang luar negeri yang dapat dirundingkan dan utang dalam negeri sepenuhnya merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia mendatang.⁶ Delegasi Indonesia (baik Republik maupun Federasi) menolak keinginan Belanda tersebut. Delegasi Indonesia hanya mengakui utang Hindia-Belanda sampai saat menyerahnya Jepang pada bulan Maret 1942. Para delegasi Indonesia menolak untuk menanggung biaya-biaya lnsung maupun tidak langsung yang terjadi karena Aksi Militer Belanda melawan Republik Indonesia.⁷

Dengan diajukannya usul balasan Indonesia, Perundingan menjadi gagal sehingga delegasi Belanda mengajukan pendapat bahwa penyerahan kedaulatan tidak dapat dilakukan berdasarkan masalah ini, karena hal itu pihak Indonesia akhirnya menyetujui untuk membayar sejumlah utang, delegasi Indonesia menyadari hal tersebut sebagai harga dari suatu penyerahan kedaulatan. Setelah terjadi tawar menawar, Indonesia hanya mengakui utang sebesar f. 3.400 juta gulden.⁸

1.2 Masalah Uni dalam Uni Indonesia-Belanda

Konferensi Meja Bundar telak selesai dilaksanakan, dalam bidang politik ada ikatan Uni dalam hubungan Indonesia-Belanda. Hal ini menjadi perdebatan diantara pejabat Indonesia. Hatta menerangkan Uni hanya sebagai lambing, ratu

⁵ Warniati Jusar, “Perundingan tentang Utang Republik pada KMB (Konferensi Meja Bundar)”, (*Skripsi UNP, Padang, 2007*), hlm. 27

⁶ *Ibid.*, 33-34.

⁷ *Ibid.*, 36.

⁸ Warniati Jusar, “Perundingan tentang Utang Republik pada KMB (Konferensi Meja Bundar)”, (*Skripsi UNP, Padang, 2007*), hlm. 41

Belandasekedar mempunyai kedudukan seremonial di dalamnya. Ini berbeda dari perjanjian Linggarjati yang menentukan bahwa keputusan Uni diambil “atas nama ratu”. Uni yang sekarang merupakan forum kerjasama buka superstaat (negara di atas negara).⁹

1.3 Masalah Irian Barat

Penyerahan kedaulatan atas Indonesia oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 meninggalkan keresidenan Irian Barat sebagai daerah sengketa. Hal ini diatur dalam piagam penyerahan kedaulatan pasal 2 dokumen KMB.¹⁰ Adapun alasan penundaan Irian Barat disebabkan:

- a) Keterbatasan waktu. KMB yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 tetapi belum menuntaskan Irian Barat. Karena di dalam KMB masing-masing negara berbeda pandangan dalam menilai status Irian Barat, hal itu diwarnai dengan perdebatan, diskusi dan upaya kompromi sehingga memakan waktu yang lebih panjang.¹¹
- b) Perbedaan pandangan tentang status Irian Barat. Delegasi Indonesia dan Belanda sama-sama ingin mendapatkan Irian Barat sehingga apapun yang dibicarakan berkaitan dengan Irian Barat diperhitungkan secara rinci dan seksama sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing.¹²
- c) Dokumen tentang sengketa Irian Barat tidak diatur secara rinci. Dokumen KMB yang berkaitan dengan masalah Irian Barat bersifat umum supaya lebih mudah dalam mencapai kompromi. Hal tersebut bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru menjadi sumber ketegangan antara Indonesia-Belanda karena mengandung perbedaan penafsiran terhadap dokumen tersebut.¹³

⁹ Deliar Noer. *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 365

¹⁰ Muhammad Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 118

¹¹ Siswanto Ahmed, “Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950: Sebuah Kajian Historis”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 2, No. 1 (2005), hlm. 48

¹² *Ibid.*, 68.

¹³ M. Cholil, 1979, hlm. 5

2. Kekayaan Alam Irian Barat

Daerah yang didominasi oleh penduduk berkulit hitam ini ternyata memiliki pesona alam dan kekayaan alam yang luar biasa.¹⁴ Berdasarkan penelitian, emas di Papua merupakan tambang emas terbesar di dunia. Hal itu diketahui bermula dari tahun 1936 ketika perusahaan eksplorasi minyak Belanda-Amerika Serikat bekerja sama dalam sebuah misi mensponsori tiga orang pendaki ke pegunungan Papua, tempat mereka menemukan emas. Gunung itu kaya akan tembaga dan emas yang menonjol dari daratan Alpen. Analisis yang dilakukan di Belanda kemudian menunjukkan bahwa bobot kadar emas di gunung tersebut dua kali lipat dari pertambangan terbesar pada waktu itu, tambang Witwatersrand di Afrika Selatan. Jean Jacques Dozy, geologis Belanda yang menemukannya menjulukinya sebagai “Ertsberg” (gunung besi). Ketika pertambangan dimulai beberapa dekade kemudian, ternyata kekayaannya lima kali lipat daripada Ertsberg.¹⁵

Kekayaan alam inilah yang membuat banyak Negara berusaha menguasai daerah tersebut, salah satunya adalah Belanda. Disamping itu, ternyata ada juga dari pihak individu yang ingin menguasainya, dia adalah Allen Dulles (CEO CIA). Untuk memenuhi ambisi ekonominya, Dulles tega mendalangi pemberontakan di Indonesia, membunuh tokoh-tokoh politik pada tingkatan negara di Amerika Serikat dan Indonesia bahkan pada tingkat sekjen PBB, juga melakukan disinformasi terhadap siapapun tanpa terkecuali kepada Presiden Kennedy yang seharusnya mendapat informasi yang akurat dan orang yang seharusnya ia lindungi.¹⁶ Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa kekayaan alam terutama emas di Irian Barat sangat melimpah sehingga siapapun yang menguasai daerah ini akan mendapat keuntungan yang sangat besar bahkan lebih untuk membangun perekonomiannya ke arah yang lebih maju.

¹⁴ Nuura Nurida Fasa, “Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951”, *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 138

¹⁵ Greg Poulgrain. *Bayang-bayang Intervensi: Perang Siasat Jhon F. Kennedy dan Allen Dulles Atas Sukarno* (Yogyakarta: Best Publisher, 2017), hlm. xix

¹⁶ *Ibid.*, xi.

3. Argumen Belanda Mempertahankan dan Indonesia Meminta Irian Barat

Munculnya masalah Irian Barat dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan dalam menilai status Irian Barat. Perbedaan pandangan tersebut sebagai berikut.

3.1 Ras penduduk Irian Barat berbeda dari ras penduduk Indonesia lainnya

Belanda mempertahankan Irian Barat karena penduduk Irian Barat tidak memiliki kemiripan fisik dengan penduduk Indonesia lainnya. Irian Barat lebih bersifat Melanesia, Polynesia atau Australia.¹⁷ Presiden Kennedy sewaktu Presiden Sukarno menemuinya pada tanggal 24 April 1961 menegaskan bahwa Kepulauan Solomon dan Irian Barat lebih kelihatan memiliki pertalian ras yang sama dan mereka mempunyai budaya yang sama.¹⁸

Melalui PBB dalam sidang ke IX Majelis Umum PBB, pemerintah Indonesia mengatakan sesuai dengan uraian Dr. Van Royen di Dewan Keamanan PBB tahun 1948 bahwa Indonesia paling tidak terdiri atas 17 golongan etnik dan linguistik dengan ikatan persatuan bahasa sehingga perbedaan ras antara penduduk Irian Barat dengan penduduk Indonesia lainnya tidak dapat dipakai sebagai ukuran.¹⁹

3.2 Irian Barat bagian dari Indonesia

Berdasarkan hak alamiah atau hak mutlak bahwa daerah yang dikuasai de facto oleh pemerintah Belanda ialah bagian tanah air Indonesia yang dahulu dinamai wilayah Hindia-Belanda di zaman kolonial. Hak mutlak itu diwujudkan dalam kalimat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia” dengan termasuk Irian Barat di dalamnya.²⁰ Makna yang sama namun dengan ungkapan yang berbeda dikemukakan pula oleh Kodam Trikora, “Bangsa Indonesia

¹⁷ Nuura Nurida Fasa, “Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951”, *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 138

¹⁸ Greg Poulgrain. *Bayang-bayang Intervensi: Perang Siasat Jhon F. Kennedy dan Allen Dulles Atas Sukarno* (Yogyakarta: Best Publisher, 2017), hlm. 225

¹⁹ M. Cholil. *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat* (Jakarta: Departemen Pertahanan Pusat Sejarah ABRI, 1979), hlm. 11-12

²⁰ Muhammad Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 118-119

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu dimaksudkan untuk seluruh bekas jajahan Belanda di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jelas Irian Barat tidak terkecuali”. Artinya Irian Barat bukanlah sebuah bangsa yang lain dari Indonesia, melainkan Irian Barat adalah bagian integral dari Indonesia.²¹

Namun pihak Belanda menyangkal hal tersebut dengan menyatakan Irian Barat bukan bagian dari Indonesia. Hal ini didasari oleh isu perbedaan ras antara penduduk Irian Barat dengan penduduk Indonesia lainnya yang sering dikatakan Belanda.²²

3.3 Daerah Irian Barat masih terbelakang

Delegasi Belanda berpendapat bahwa daerah Irian Barat masih terbelakang baik dari segi tanahnya yang kurang subur, iklim yang tidak sehat, daerahnya luas dan terbagi-bagi dalam suku-suku kecil yang terpencar serta banyak daerah yang belum dapat dijangkau.²³ Malahan Belanda menganggap bahwa Indonesia sendiri sebagai negara yang masih terbelakang, tidak mempunyai cukup biaya dan tenaga untuk memajukan Irian Barat.²⁴ Dengan demikian Irian Barat harus berada di luar Republik Indonesia Serikat nantinya dan mempunyai hubungan politik secara khusus dengan Kerajaan Belanda yang akan diperintah sesuai dengan Piagam PBB tentang perwalian dengan mengusahakan kemajuan melalui pendidikan penduduknya dan mengembangkan ekonominya.²⁵

Hal itu ditanggapi Indonesia dengan menyatakan kekuasaan Belanda seperti juga pada masa lalu tidak banyak berbuat untuk kemajuan ekonomi dan sosial di Irian Barat.²⁶

²¹ Amiruddin al Rahab. *Heboh Papua* (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 163-164

²² Maya Nurhasni, “Peranan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dalam Operasi Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963”, (*Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia*, Bandung, 2013), hlm. 114

²³ Nazaruddin Lubis. *Irian Barat* (Jakarta:Jajasan Gotong Rojong, 1962) Nazaruddin Lubis. *Irian Barat* (Jakarta:Jajasan Gotong Rojong, 1962), hlm. 15

²⁴ M. Cholil. *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat* (Jakarta: Departemen Pertahanan Pusat Sejarah ABRI, 1979), hlm. 7

²⁵ *Ibid.*, 4.

²⁶ *Ibid.*, 10-11.

3.4 Kepentingan negara yang bersengketa terhadap Irian Barat

Tuntutan Belanda terhadap Irian Barat bertujuan untuk menjadikan Irian Barat sebagai daerah kolonial dan melanjutkan kolonialisme di Pantai Pasifik. Sedangkan tuntutan Indonesia kepada pemerintah Belanda atas status Irian Barat adalah sebagai perjuangan kemerdekaan yaitu membebaskan bangsa dan tumpah darah Indonesia dari tangan penjajah.²⁷

4. Pengaruh Konflik Irian Barat Antara Indonesia dan Belanda bagi Irian Barat Dikemudian Hari

Konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat dimulai dari KMB. Dalam KMB dinyatakan bahwa pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia, tidak termasuk Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam suatu perundingan Uni Indonesia-Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.²⁸ Semestinya pada akhir tahun 1950, Belanda sudah mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia tetapi setelah KMB, penyelesaian sengketa Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tetap mempertahankan Irian Barat, maka sejak 1949 Irian Barat merupakan wilayah persengketaan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.²⁹

Untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat maka dilakukan diplomasi, tetapi tidak membuahkan hasil kemudian dilanjutkan dengan militer yang menghasilkan Perjanjian New York. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Badan Peralihan Sementara PBB yaitu United Nation Temporary Executive Authority.³⁰ Konflik

²⁷ Nuura Nurida Fasa, "Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951", *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 138

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Zulimarni, "Proses Pengembalian Irian Barat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia Melalui Jalur Diplomasi", (*Skripsi UNP*, Padang, 2008), hlm. 11

³⁰ Rycho Korwa, "Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI" (*Skripsi Universitas Sam Ratulangi*, Manado, 2013), hlm. 3-4

diakhiri dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang menyatakan bahwa penduduk Irian Barat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah Irian Barat yang akhirnya dapat diselesaikan Indonesia dan Belanda ternyata memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Adapun masalah tersebut sebagai berikut.

4.1 Organisasi Papua Merdeka (OPM)

OPM adalah organisasi yang menuntut kemerdekaan Irian Barat (Papua). Lahirnya OPM dimulai dari rasa nasionalisme sebagian penduduk Irian Barat yang mulai meningkat setelah Belanda mendirikan sekolah Pamong Praja pada tahun 1940. Sekolah ini akan menghasilkan pegawai administrasi kolonial Belanda. Di sini, anak-anak Papua juga berkesempatan untuk mendiskusikan persoalan Kepaduaan termasuk kemungkinan Papua menjadi negara merdeka. Nasionalisme yang mulai tumbuh semakin meningkat setelah Belanda pada tahun 1960-an menjanjikan kemerdekaan kepada penduduk Papua dengan mempersiapkan lagu dan lambang negara Papua.³¹ Gerakan OPM sendiri telah memakan banyak korban jiwa, baik itu anggota OPM, ABRI maupun penduduk setempat.

4.2 Freeport

PT Freeport Indonesia adalah tambang mineral gabungan dari Freeport McMoran (Perusahaan Amerika) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero Inalum). PT Freeport Indonesia menambang dan memproses bijih menghasilkan konsentrat yang mengandung emas, perak dan tembaga. PT Freeport Indonesia berada di Kabupaten Mimika, Papua.

Aktivitas pertambangan Freeport di Papua dimulai tahun 1967 sampai sekarang. Pada Bulan Maret 1973 Freeport memulai pertambangan terbuka. Selama ini kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua telah mendatangkan keuntungan finansial yang sangat besar namun belum memberikan kesejahteraan ataupun manfaat optimal bagi Papua, negara dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan, tetapi

³¹ Amiruddin al Rahab. *Heboh Papua* (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 23

sebaliknya malah menimbulkan permasalahan. Adapun permasalahannya adalah penerimaan negara yang tidak optimal dari Freeport, terjadinya pemiskinan di Papua, mendatangkan masalah lingkungan, terjadinya pelanggaran HAM dan proyek infrastruktur Freeport diduga berbau KKN.³²

4.3 Otonomi Khusus (Otsus)

Secara umum Otsus dapat diartikan sebagai pembangunan, kemerdekaan, demokratisasi, pengakuan HAM atau pemajuan supremasi hukum. Secara politik, otonomi diartikan sebagai berpemerintahan sendiri atau mengatur diri sendiri.³³ Disini, Papua diberikan Otsus oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Alasannya karena menguatnya aspirasi politik bangsa Papua yang menuntut merdeka atau pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi ini menguat terutama pada tahun 1999-2000.

Proses penerapan Undang-undang Otsus bagi Provinsi Papua sejak ditetapkan memang rumit dan berliku. Meskipun dana yang digelontorkan besar, namun pelaksanaan Otsus Papua masih menghadapi tantangan dan permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya pemekaran Provinsi Papua yang tidak terkendali, rendahnya kapasitas aparat pelaksana daerah dan tidak konsistennya pemerintah pusat serta maraknya korupsi.³⁴

IV. KESIMPULAN

Bila dicermati, masalah Irian Barat memang sangat rumit dan berliku. Bermula dari KMB tahun 1949 sampai sekarang, masalah Irian Barat belum terselesaikan. Priode pertama terkait masalah Irian Barat dimulai dari konflik antara Indonesia dan Belanda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, munculnya masalah Irian Barat dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan dalam menilai status Irian Barat, kedua

³² Marwan Batubara, "Sejarah Kelam Tambang Freeport (2), Laporan *Eramuslim*, Jum'at, 6 November 2015

³³ Yorrys Th Raweyai. *Mengapa Papua Ingin Merdeka* (Jayapura: Desanti Grafika, 2002), hlm. 154

³⁴ Frits Bernard Ramandey dan Lucky Ireeuw. *Profil Otonomi Khusus Papua* (Jayapura: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, 2005), hlm. 163-168

negara merasa paling berhak menyertakan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Berbagai macam cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda terkait masalah Irian Barat mulai dari diplomasi sampai menggunakan militer yang memakan cukup banyak korban jiwa. Akhirnya pada tahun 1963 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Badan Peralihan Sementara PBB yaitu United Nation Temporary Executive Authority melalui Perjanjian New York dan Irian Barat secara resmi berada dalam kekuasaan Indonesia terjadi pada tahun 1969 melalui penentuan pendapat rakyat.

Masalah Irian Barat (Papua) yang akhirnya bisa diselesaikan ternyata menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Kali ini, masalah Papua terjadi antara pemerintah Indonesia dengan sebagian penduduk Papua. Sebagian penduduk Papua menuntut kemerdekaan. Hal ini terjadi karena ketidakpuasaan terhadap keadaan, kekecewaan dan telah tumbuh rasa nasionalisme Papua sehingga melahirkan suatu gerakan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tak hanya itu, Freeport yang mulai beroperasi tahun 1967 di Papua yang telah mendapat keuntungan finansial yang sangat besar ternyata tidak memberikan manfaat atau kesejahteraan bagi negara, Papua dan penduduk di sekitar lokasi tambang. Malah menimbulkan permasalahan, diantaranya penerimaan negara yang tidak optimal, terjadinya pemiskinan di Papua, mendatangkan masalah lingkungan, terjadinya pelanggaran HAM dan proyek infrastruktur Freeport diduga berbau KKN. Karena kedua masalah tersebut, maka lahirlah Otonomi Khusus (Otsus) sebagai solusi untuk meredam keinginan merdeka. Dalam proses penerapannya ternyata masih menghadapi permasalahan seperti pemekaran Provinsi Papua yang tidak terkendali, rendahnya kapasitas aparat pelaksana daerah dan tidak konsistennya pemerintah pusat serta maraknya korupsi.

Saran

Disini, penulis kurang memaparkan mengenai Organisasi Papua Merdeka, Freeport, Otonomi Khusus dikarenakan waktu yang singkat, kurangnya sumber yang

dudapat serta terbatasnya kemampuan penulis. Penulis mengharapkan penulis selanjutnya bisa meneliti mengenai masalah Irian Barat yang muncul setelah Papua berintegrasi dengan Republik Indonesia dan reaksi pemerintah terhadap masalah tersebut yang di teliti secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin al Rahab. 2010. *Heboh Papua*. Depok: Komunitas Bambu
- Deliar Noer. 1991. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES
- Frits Bernard Ramandey & Lucky Ireeuw. 2005. *Profil Otonomi Khusus Papua*. Jayapura: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua
- Maya Nurhasni, "Peranan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dalam Operasi Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963" (*Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013*)
- Marwan Batubara, "Sejarah Kelam Tambang Freeport (1), *Eramuslim*, Jum'at, 6 November 2015
- Marwan Batubara, "Sejarah Kelam Tambang Freeport (2), *Eramuslim*, Sabtu, 7 November 2015
- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- M. Cholil. 1979. *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Depertemen Pertahanan-Kemampuan
- Nazaruddin Lubis. 1962. *Irian Barat*. Jakarta: Jajasan Gotong Rojong
- Nuura Nurida Fasa, "Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951", *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013)
- Rycho Korwa, "Proses Integrasi Irian Barat ke Dalam NKRI" (*Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013*)
- Siswanto Ahmed, "Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950: Sebuah Kajian Historis", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 2, No. 1 (2005)

Poulgrail, Greg. 2017. *Bayang-bayang Intervensi: Perang Siasat Jhon F. Kennedy dan Allen Dulles Atas Sukarno*. Tejemahan Philip Manhken, dkk. Yogyakarta: Best Publisher

Warniati Jusar, “Perundingan Tentang Utang Republik pada KMB (Konferensi Meja Bundar)”, (*Skripsi UNP, Padang, 2007*)

Yorrys Th Raweyai. 2002. *Mengapa Papua Ingin Merdeka*. Jayapura: Desanti Grafik

Zulimarni, “Proses Pengembalian Irian Barat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia Melalui Jalur Diplomasi”, (*Skripsi UNP, Padang, 2008*)